**ABSTRAK**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBALAKAN LIAR**

**DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MUHAMMAD HAFIZ LUBIS**

**NPM. 175114058**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberi penjelasan tentang upaya untuk mencegah dan memberantas pelaku perusakana hutan termasuk pembalakan liar. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Kejahatan pembalakan liar adalah tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik delik kehutanan yang membahas pengelolaan hasil hutan kayu. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar di Sumatera Utara. Hambatan apa yang di hadapi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera utara dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar, Bagaimana solusi yang dilakukan Dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar di Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi pustaka, dokumen, dan wawancara. Setelah data terkumpul selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa Pembalakan liar yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara hampir terjadi setiap tahun. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Sumatera utara mulai dari sumber daya manusia, kurangnya anggaran dan sarana prasana yang kurang ideal dengan jumlah personel yang ada. Solusinya dengan melakukan penganggaran agar bisa bertambah personil polisi hutan dan PPNS serta sarana prasarana yang demi mendukung pengelolaan hutan yang baik demi masa depan bersama.

*Kata kunci: penegakan, hukum, pembalakan liar*

***ABSTRACT***

***THE ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST ILLEGAL LOGGING IN NORTH SUMATRA PROVINCE***

**MUHAMMAD HAFIZ LUBIS**

**NPM. 175114058**

*Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction details actions to prevent and remove forest destruction culprits, including illicit logging. Illicit logging encompasses all forms of organized illegal exploitation of wood forest products. Illegal logging is a unique crime that falls under the category of criminal law involving unique actions, specifically forestry offenses involving the management of wood forest products. The study questions are as follows: (1) How effective is the criminal law against illicit logging in North Sumatra? (2) What challenges does the North Sumatra Provincial Forestry Service confront in enforcing anti-illegal logging legislation? (3) How is the North Sumatra Provincial Forestry Service to overcome impediments to enforcing the law against illicit logging in North Sumatra? This paper’s research methodology included a review of the literature, examination of documents, and conducting interviews. After data was acquired, it was processed by evaluating, classifying, and compiling it. Qualitative descriptive research was a subset of qualitative research. The findings of this research revealed that illegal logging happens almost annually in North Sumatra Province. The North Sumatra Forestry Service was constrained by a lack of human resources, a lack of funding, and infrastructure that was inadequate for the number of staff available. The solution was to allocate funds to increase forest police and PPNS personnel, as well as infrastructure to enable sustainable forest management for the common good.*

*Keywords: enforcement, law, illegal logging*